



DETERMINAN FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Adhitya Wardhana¹ Bayu Kharisma² Muhammad Dzaki Fahd Haekal³

Abstract

Keywords:

Government Expenditure;
Pdrb Percapita Income ;
Gini Ratio;
Panel Data;

The impact of Covid 19 impact the real sector in the country. Several provinces has experienced a fall in economy activity impact on increasing the poverty rate. The West Java Province being one significant impact from Covid 19 having poverty rate above average National. The poverty growth in West Java would depend on growing to poverty in West Java regional. This study analyzes the determinants of social and economic factors on poverty in districts/cities in West Java in 2016-2020.. Fixed and random effect model as research method. The result show significantly government spending on the function the education, health and social protection on decreasing poverty rate. Then, GDRP capita had significant and negatif corelated on poverty rate and gini rasio had a statistical (positive correlated) on poverty rate.

Kata Kunci:

Belanja Pemerintah;
PDRB Perkapita;
Rasio Gini;
Data Panel.

Abstrak

Dampak dari Covid 19 memberikan dampak penurunan sektor riil di negara Indonesia. Beberapa provinsi mengalami penurunan aktifitas ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang terdampak Covid 19 dan memiliki angka kemiskinan diatas rata-rata Provinsi di Indonesia. Perkembangan penduduk miskin Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari perkembangan penduduk miskin daerah di Jawa Barat. Oleh karena itu, masih banyak daerah di Jawa Barat yang memiliki angka kemiskinan melebihi rata-rata kemiskinan Jawa Barat. Penelitian ini menganalisis determinan faktor sosial dan ekonomi terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2016-2020. Metode penelitian menggunakan model *fixed effect*. Hasil dari penelitian variabel dari pengeluaran pemerintah (rasio belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap PDRB) tahun sebelumnya mempengaruhi negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian variabel PDRB perkapita mempengaruhi negatif terhadap tingkat kemiskinan dan variabel gini rasio mempengaruhi positif terhadap tingkat kemiskinan.

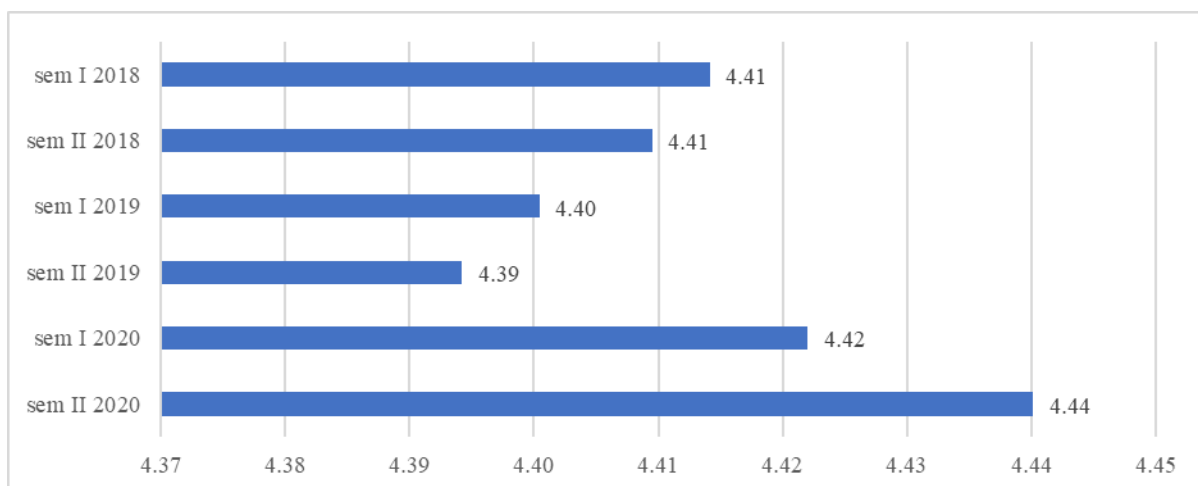
Koresponding:

Departemen Ilmu Ekonomi,
Universitas Padjadjaran, Jawa
Barat, Indonesia
Email:
adhitya.wardhana@fe.unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi perhatian utama bagi pemerintah yang dianggap sebagai permasalahan serius. Kemiskinan menunjukkan kondisi masyarakat yang tidak memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pangan, sandang, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak yang harus dipenuhi sarana dan prasarana oleh pemerintah dalam mengelola daerahnya. Tingkat kesejahteraan yang rendah menjadi salah satu tolak ukur terjadinya kemiskinan. Perkembangan kesejahteraan suatu wilayah dapat dilihat dari kondisi tingkat kemiskinan setiap tahun. Setiap negara menginginkan tingkat kemiskinan penduduk semakin rendah dalam setiap tahunnya sehingga peranan pemerintah semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan. Di sisi ekonomi, kemiskinan sering dipandang sebagai suatu penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar atau memiliki pengeluaran konsumsi dibawah garis kemiskinan.

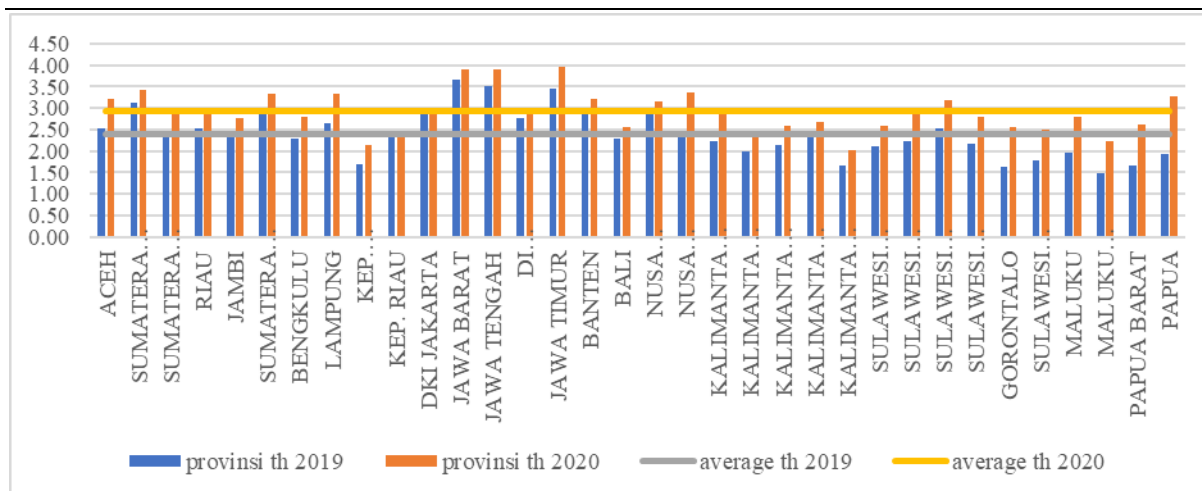
Adanya Covid 19 membuat seluruh negara dirugikan yang mengakibatkan penurunan aktifitas ekonomi. Kegiatan perekonomian yang sempat menurun drastis menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sangat merasakan dengan *pandemic* ini. Angka kemiskinan di Indonesia sempat mengalami penurunan pada semester II tahun 2018 hingga semester II tahun 2019 dan di awal tahun 2020 angka kemiskinan melonjak naik sampai semester 2 tahun 2020. Lonjakan kemiskinan dampak adanya *pandemic* dari penurunan drastis oleh aktifitas perekonomian yang membuat perusahaan memberhentikan para pekerja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 1.
Tingkat Kemiskinan di Indonesia Semester I dan II Tahun 2018-2020 (persen)

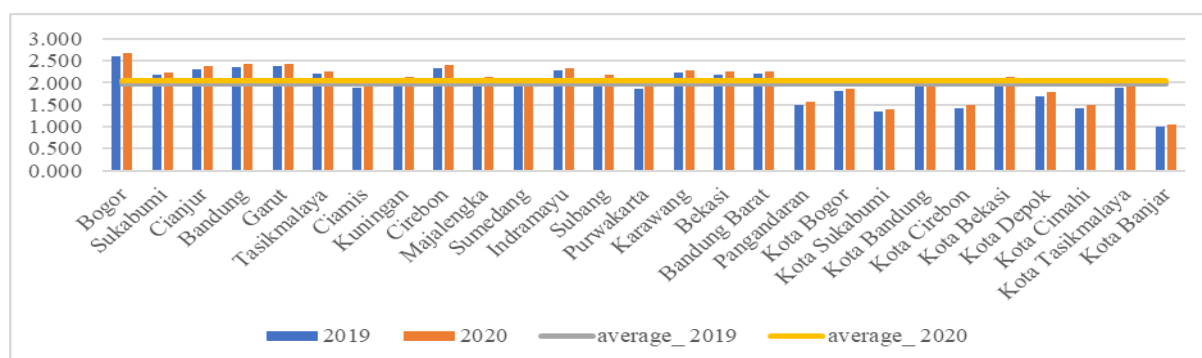
Kemiskinan mengalami peningkatan di tahun 2020 akan berimbas kemiskinan terhadap provinsi yang ada di Indonesia. Gambar dibawah ini menunjukkan perbandingan kemiskinan antar provinsi dengan kemiskinan rata-rata provinsi di Indonesia tahun 2019-2020. Kondisi kemiskinan mengalami peningkatan umumnya disetiap provinsi dari peralihan tahun 2019 ke tahun 2020. Bahkan beberapa provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan selama ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan provinsi lain yang terlihat dari tingkat kemiskinan melebihi rata-rata provinsi di tahun 2019-2020 (lihat Gambar 2).



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.
Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020 (persen)

Provinsi di Pulau Jawa yang umumnya menjadi pusat kegiatan perekonomian dan mengandalkan sektor industry tidak berjalan baik sehingga meningkatkan kemiskinan. Peningkatan kemiskinan tersebut akibat dari pemutusan tenaga kerja oleh perusahaan dari dampak Covid 19. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terkena imbas pandemi Covid 19 membuat persentase angka kemiskinan semakin tinggi. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang mengandalkan sektor industri mengalami penurunan akibat adanya pandemi. Hal ini akan terlihat dari kabupaten/kota Jawa Barat yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap angka kemiskinan. Kondisi angka dari persentase kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Pada gambar 3 memperlihatkan daerah mana saja yang melebihi angka kemiskinan rata-rata di Jawa Barat. Daerah Jawa Barat di tingkat kabupaten umumnya mendekati dan melebihi angka rata-rata kemiskinan tahun 2019-2020. Kabupaten di Jawa Barat yang tidak melebihi rata-rata kemiskinan yaitu Kab. Purwakarta, Kab. Ciamis dan Kab. Pangandaran dan kabupaten selebihnya melebihi dan menyamai rata-rata kemiskinan di tahun 2019-2020. Sisi perkotaan, hanya Kota Bekasi yang melebihi rata-rata kemiskinan Jawa Barat. Kota Bekasi salah satu daerah yang memiliki daya beli konsumsi tinggi yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Disamping itu, adanya Covid 19 berdampak peningkatan pengangguran karena kota Bekasi merupakan salah satu yang bergerak pada sektor industry dan jasa. Peningkatan pengangguran secara tidak langsung akan meningkatkan kemiskinan.

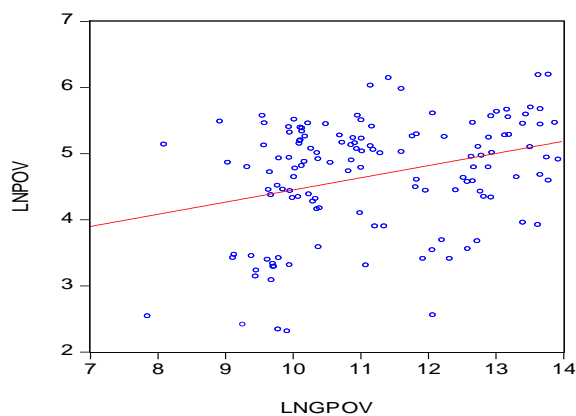


Sumber: BPS (diolah)

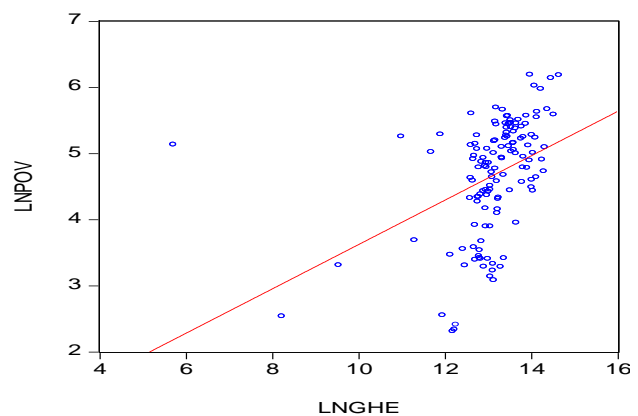
Gambar 3.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 (persen)

Adanya pandemi ini pemerintah daerah di Jawa Barat akan berupaya untuk memulihkan aktifitas ekonomi dengan menurunkan angka kemiskinan. Belanja pemerintah daerah menjadi salah satu solusi untuk menurunkan angka kemiskinan. Peran pemerintah melalui belanja pemerintah menjadi salah satu langkah kongkrit dalam menurunkan kemiskinan (Abdelhak, dkk, 2012). Belanja pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan sumber daya manusia yang secara tidak langsung diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

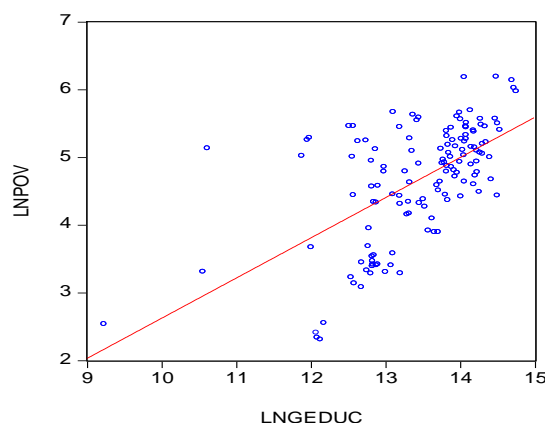
Belanja perlindungan sosial merupakan belanja pada program penurunan kemiskinan (*Pro-poor Program*). Belanja *Pro-poor Program* sebagai langkah intervensi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Ulu (2018), kebijakan dengan meningkatkan belanja perlindungan sosial akan mempengaruhi masyarakat miskin (Ulu, 2018). Studi penelitian McMaken (2015), kebijakan yang efektif dengan mengeluarkan belanja perlindungan sosial untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Peran pemerintah dalam mengalokasikan belanja perlindungan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan dapat dilihat pada gambar 4. Gambar 4 (a) menunjukkan hubungan searah antara belanja perlindungan sosial dengan tingkat kemiskinan. Hubungan pada gambar diatas, bahwa belanja perlindungan sosial belum mampu menurunkan kemiskinan. Jadi pada umumnya di daerah Jawa Barat masih kesulitan dalam menurunkan kemiskinan melalui belanja perlindungan sosial.



Gambar 4a



Gambar 4b



Gambar 4c

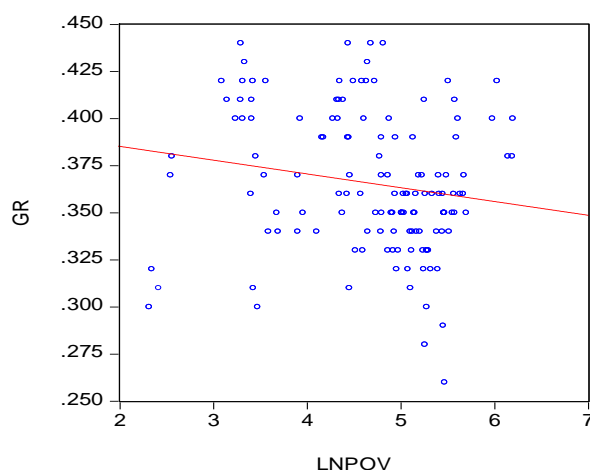
Sumber: BPS (diolah)

Gambar 4.

Scatter plot Belanja Perlindungan Sosial, Belanja Kesehatan dan Belanja Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Gambar 4b menunjukkan hubungan belanja bidang kesehatan dengan kemiskinan dengan trend positif. Hubungan positif antara belanja bidang kesehatan dan angka kemiskinan mengindikasikan belanja bidang kesehatan belum sepenuhnya dapat menurunkan kemiskinan. Belanja pemerintah di bidang pendidikan yang terlihat pada gambar 4c memiliki hubungan positif dengan kemiskinan. Peningkatan belanja pendidikan tidak dapat sepenuhnya menurunkan kemiskinan. Kondisi pengeluaran pemerintah daerah belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Perencanaan keuangan dan sumber penerimaan daerah menjadi modal penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Studi Adegboyo (2020) menunjukkan hasil dari pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kemiskinan sehingga pemerintah dapat melakukan subsidi untuk masyarakat miskin (Adegboyo, 2020). Studi Ishak, (2017) menjelaskan pengaruh belanja pemerintah secara tidak langsung mempengaruhi penurunan kemiskinan. Belanja pemerintah dapat dimulai melalui belanja diluar belanja kemiskinan seperti belanja pendidikan yang membenahi terlebih dahulu sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian Pangestuty & Prasetya, (2012) berpendapat peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan berdampak terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin melalui pengurangan buta huruf di daerah pedesaan.

Peningkatan kemiskinan suatu daerah tidak terlepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat. Perbedaan kesejahteraan akan membedakan pendapatan masyarakat di setiap daerah sehingga akan memunculkan *gap* pendapatan antar daerah. Adanya *gap* pendapatan antar daerah yang sering disebut sebagai ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan masyarakat setiap daerah akan menimbulkan variasi kemiskinan antar daerah. Kondisi kemiskinan kabupaten/kota yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki hubungan dengan ketimpangan pendapatan. Hubungan ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



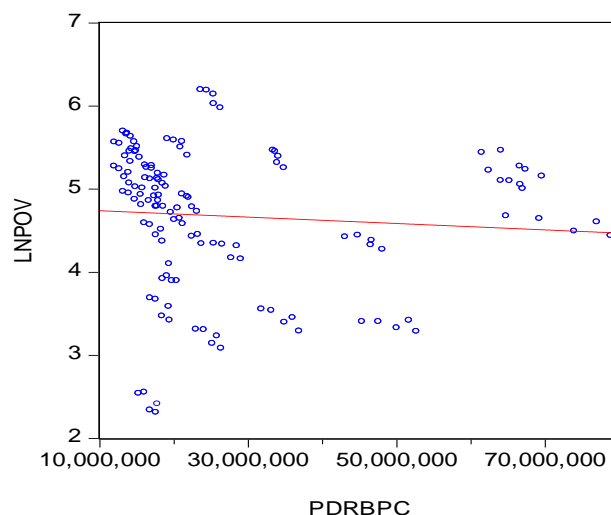
Sumber: BPS (diolah)

Gambar 5.
Scatterplot Gini Ratio dengan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Gambar 5 memperlihatkan hubungan negatif antara ketimpangan pendapatan (gini ratio) dengan kemiskinan, peningkatan gini ratio dapat menurunkan kemiskinan. Hal ini menjadi permasalahan penting ketika pemerintah menurunkan ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan tinggi akan identik dengan peningkatan kemiskinan. Studi hipotesis dari Leow & Tan, (2019), ketimpangan pendapatan mempengaruhi positif terhadap angka kemiskinan.

Peningkatan kemiskinan akan memperbesar *gap* terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat antar daerah. Salah satu kunci penurunan ketimpangan yaitu peningkatan pendapatan masyarakat di setiap daerah dengan peningkatan pendapatan yang tidak jauh berbeda. Namun hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah melalui belanja yang bermodalkan dari besaran penerimaan

daerah. Perubahan kesejahteraan masyarakat akan menunjukkan perubahan angka kemiskinan. Berdasarkan gambar 6, menunjukkan hubungan negatif antara PDRB perkapita (kesejahteraan) dengan tingkat kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan yang diprosikan dengan PDRB perkapita sangat kecil dalam menurunkan kemiskinan, hal terlihat dari *trend* yang tidak elastis antara PDRB perkapita dengan kemiskinan.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 6.
Scatterplot PDRB perkapita dengan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Berdasarkan penjelasan diatas, pengaruh belanja pemerintah daerah di Jawa Barat belum mampu menurunkan ketimpangan baik dari belanja perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan. Kemudian hubungan ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan berhubungan berbalik sehingga pemerintah daerah harus memikirkan kedua variabel tersebut menjadi suatu yang kontradiktif. Begitu juga dengan peningkatan kesejahteraan belum optimal dalam menurunkan kemiskinan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat seberapa besar pengaruh faktor sosial dan ekonomi dalam terhadap kemiskinan antar kabupaten/kota di Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat analisis deskriptif. Ruang lingkup penelitian di Kabupaten/Kota Jawa Barat periode 2016-2020. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. Pengujian *Chow* dan *Hausman* digunakan dalam penelitian untuk menentukan apakah model menggunakan *common effect* atau *fixed effect* atau *random effect*. Model yang digunakan mengacu penelitian Senadjki Abdelhak (2012) dan Kah Wei Leow & Eu Chye Tan (2019) yang dimodifikasi sebagai berikut:

$$\text{LnPOV}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{GDPcap} + \alpha_2 \text{GEDUC}_{it-1} + \alpha_3 \text{GHE}_{it-1} + \alpha_4 \text{GPOV}_{it-1} + \alpha_5 \text{LnGINI}_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Penelitian dilakukan pengujian statistic seperti Uji t, Uji F dan uji asumsi klasik. Variabel terikat dalam penelitian adalah tingkat kemiskinan (LnPOV). Variabel bebas menggunakan variabel PDRB perkapita (GDPcap), rasio belanja pendidikan dengan PDRB (GEDUC), rasio belanja kesehatan terhadap PDRB (GHE), rasio belanja perlindungan sosial terhadap PDRB (GPOV) dan ketimpangan pendapatan (GINI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dianalisis melalui hasil statistik deskriptif dan hasil estimasi metode *fixed effect* (panel data). Hasil estimasi pada model penelitian ini menggunakan regresi *Generalized Least Square* (GLS) untuk melakukan koreksi uji asumsi klasik seperti autokorelasi dan heterokedastisitas (Gujarati, 2006). Kemudian tabel dibawah ini akan menjelaskan statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Dengan jumlah sampel 135, tingkat kemiskinan memiliki nilai terkecil 2.3125 dan nilai terbesar 6.1960%. Rata-rata tingkat kemiskinan dalam 135 sampel menunjukkan hasil positif yaitu 4.6740%. Standar deviasi dari tingkat kemiskinan sebesar -0.8082% yang berarti kecenderungan data tingkat kemiskinan setiap tahun memiliki tingkat penyimpangan sebesar -0.8082%.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

Stat	LNPOV	GDPcap	GEDUC	GHE	GPOV	GINI
Mean	4.6740	7.437	2.7542	2.1308	0.6479	0.3657
Maximum	6.1960	7.897	7.0518	6.6817	5.9756	0.4400
Minimum	2.3125	7.077	0.1622	0.0012	0.0131	0.2600
Std. Dev.	-0.8082	7.2319	0.6353	1.2390	2.6635	0.0105
Observations	135	135	135	135	135	135

Sumber : pengolahan data, 2022

Variabel PDRB perkapita memiliki nilai minimum sebesar 7.0775% dan nilai maksimum sebesar 7.077%. Rata-rata PDRB perkapita sebesar 7.437%. Standar deviasi dari PDRB perkapita (GDPcap) sebesar 7.2139 berarti tingkat penyimpangan dari variabel tersebut sebesar 7.2139%. Selanjutnya rasio pengeluaran pendidikan terhadap PDRB (GEDUC) memiliki nilai minimum 0.1622% dan maksimum sebesar 7.0518. Rata-rata GEDUC sebesar 2.7542% dan standar deviasi sebesar 0.6353 yang berarti GEDUC memiliki variasi penyimpangan sebesar 0.6353%. Variabel rasio pengeluaran kesehatan terhadap PDRB (GHE) dengan nilai minimum 0.0012% dan maksimum 6.6817% dan rata-rata sebesar 2.1308%. kemudian standar deviasi dari GHE sebesar 1.2390 maka variasi penyimpangan GHE sebesar 1.2390%. Variabel perlindungan sosial *pro poor progamme* (GPOV) memiliki nilai minimum 0.0131% dan maksimum 5.9756%. Rata-rata dari variabel GHE yaitu 0.6479% dan standar deviasi dari GPOV sebesar 2.6636 maka variabel GPOV memiliki variasi penyimpangan sebesar 2.6635%. Terakhir variabel gini rasio (GINI) dengan nilai minimum sebesar 0.2600% dan maksimum sebesar 0.4400% serta rata-rata statistic sebesar 0.3657%. Adapun standar deviasi dari GINI sebesar 0.0105 yang diartikan variabel GINI memiliki variasi penyimpangan sebesar 0.0105%.

Pembahasan hasil selanjutnya menggunakan hasil estimasi model panel data melalui metode *Generalized Least Square* (GLS). Model penelitian yang lebih menggunakan *fixed effect* setelah dilakukan pengujian *Chow* dan *Hausman*. Berdasarkan tabel regresi dibawah ini seluruh variabel independen mempengaruhi signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel PDRB perkapita (GDPcap) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Jadi setiap peningkatan GDPcap 1 milyar akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4.65E-08%. Peningkatan GDPcap menjadi kunci pengentasan kemiskinan (Abdelhak *et al.*, 2012). Penelitian dari Leow & Tan (2019), bahwa pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB perkapita berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Sakinah & Pudjianto, (2018) menyimpulkan output perekonomian

mempengaruhi negatif terhadap tingkat kemiskinan, Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Septyo dan Gunanto (2013) dalam Sakinah & Pudjianto (2018), menyimpulkan PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 44 kota di Indonesia selama Periode analisis 2007-2010. Studi Agusalm (2017) dalam Sakinah & Pudjianto (2018) juga menemukan hasil yang sama dengan PDRB per kapita berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang di Indonesia selama periode 1978-2015.

Kondisi kemiskinan tidak terlepas dari perkembangan PDRB perkapita di setiap daerah Jawa Barat. Peningkatan PDRB perkapita di setiap daerah diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Di setiap daerah memiliki sektor andalan yang berbeda dan diupayakan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan output perkapita. Semakin banyak sektor unggulan didaerah seharusnya dapat berdampak terhadap peningkatan output perkapita serta menurunkan kemiskinan. Dilihat dari nilai koefisien GDPCap yang rendah dibandingkan variabel independen lainnya menunjukkan kontribusi yang sangat kecil dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini dapat saja disebabkan rata-rata output daerah di Jawa Barat yang rendah sehingga cukup sulit menurunkan kemiskinan meskipun mempengaruhi secara signifikan.

Tabel 2.
Hasil Regresi Persamaan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2016-2020

variabel independen	variabel dependen	
	LNPOV	Prob
c	5.8132	0.0000
GDPcap	-4.65E-08	0.0000
GEDUC	-0.024287	0.0015
GHE(-1)	-0.011533	0.0252
GPOV(-1)	-0.012750	0.0630
GINI	0.648407	0.0264
Adjusted R-squared	0.996081	
F-statistic	878.2772	
Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Rasio belanja pendidikan terhadap PDRB (GEDUC) secara statistic berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kenaikan GEDUC sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -0.024287% (*ceteris paribus*). Hasil penelitian sesuai dengan Abdelhak *et al.*, (2012) bahwa pengeluaran pendidikan dapat menurunkan kemiskinan. Peranan pendidikan secara jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM (Abdelhak *et al.*, 2012). Penduduk miskin terkadang terkendala dengan kebutuhan pendidikan seperti melanjutkan tingkat pendidikan secara berjenjang. Kebijakan pemerintah daerah dengan membiayai penduduk bersekolah dengan cara menyekolahkan penduduk miskin yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun pusat. Pemberian subsidi pendidikan yang dijalankan pemerintah seperti kartu pintar, dapat memudahkan penduduk miskin untuk bersekolah. Adanya program pendidikan berupa subsidi akan menurunkan kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Arsani, dkk, 2020).

Rasio pengeluaran kesehatan terhadap PDRB tahun sebelumnya (GHE-1) mempengaruhi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0.01153. Setiap kenaikan 1% GHE-1 akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.01153%. Penelitian yang dilakukan oleh Abdelhak *et al.*,

(2012) menjelaskan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Belanja pemerintah sektor kesehatan digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat maka peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pembiayaan dan infrastruktur kesehatan (Ramesh & Wu, 2008). Adanya belanja kesehatan untuk memudahkan keluarga miskin untuk memelihara kesehatan dapat melalui bantuan berupa subsidi kesehatan. Pada umumnya pengobatan kesehatan didominasi oleh swasta yang membuat orang miskin merasakan kesulitan dalam hal pembiayaan kesehatan (Ramesh & Wu, 2008). Sedangkan orang miskin rawan dengan penyakit dan keterbatasan kapasitas distribusi pendapatan untuk biaya kesehatan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan menjadi penting untuk kebutuhan masyarakat miskin. Namun belanja kesehatan tidak dapat berdampak langsung dalam menurunkan kemiskinan dikarenakan setiap pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan membutuhkan penerimaan daerah yang cukup besar disamping pemberian dana transfer pusat.

Pemerintah berperan sebagai penyedia barang publik melalui pendidikan dan kesehatan bermodalkan pengeluaran pemerintah, karena bidang pendidikan dan kesehatan tidak tersentuh mekanisme pasar. Kegagalan pasar agar tidak terjadi maka peranan pemerintah menjadi krusial dalam menyediakan alokasi, pendistribusian dan stabilisasi. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai elemen penting dalam memerangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dapat dijadikan sebagai investasi pendidikan dan kesehatan. Investasi publik (pendidikan dan kesehatan) memberikan peluang pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat untuk lebih merata. Investasi pendidikan dan kesehatan yang merata akan mendorong sumber daya manusia berkualitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kondisi ini perekonomian masyarakat akan bertambah maju baik dari kesempatan kerja dan berkurangnya kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh (Brata, 2005; Chemingui, 2007; Fan, Hazell, & Thorat, 2000; Sakinah & Pudjianto, 2018; Suri, Boozer, Ranis, & Stewart, 2011), pengalokasian dana pemerintah untuk pembangunan manusia sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu alokasi dana pemerintah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan.

Rasio pengeluaran perlindungan sosial dengan PDRB tahun sebelumnya (GPOV-1) mempengaruhi negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Nilai koefisien GPOVt-1 sebesar 0.01275, jadi kenaikan 1% dari GPOVt-1 akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.01275%. Menurut Taruno (2019), belanja publik dan pertumbuhan ekonomi sebagai instrumen penting untuk program penurunan kemiskinan. Belanja perlindungan sosial mampu menurunkan kemiskinan, namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan kondisi kemiskinan yang ada di daerah dikarenakan anggaran besaran belanja perlindungan sosial akan mempengaruhi penurunan kemiskinan. Hal ini terlihat dari nilai koefisien dari belanja perlindungan sosial yang sangat rendah mempengaruhi tingkat kemiskinan. Studi penelitian Taruno (2019), jika pemerintah daerah meningkatkan belanja perlindungan sosial maka akan membantu mengurangi kemiskinan; sebaliknya, mengurangi pengeluaran perlindungan sosial akan meningkatkan kemiskinan. Studi penelitian Fiszbein, Kanbur, & Yemtsov (2014), belanja perlindungan sosial akan menggerakkan program-program perlindungan sosial yang secara signifikan mempengaruhi terhadap pengentasan kemiskinan. Program perlindungan sosial tidak berjalan akan membesarkan jumlah orang miskin terutama pada negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi. Belanja perlindungan sosial melalui program pengentasan kemiskinan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan (Bandiyono, 2018).

Kemudian variabel gini rasio (GINI) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien GINI sebesar 0.648407, setiap kenaikan satu indeks dari GINI akan

meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.648407%. Menurut studi De Janvry & Sadoulet (2000), pertumbuhan pendapatan secara signifikan mengurangi kemiskinan perkotaan terutama ketika tingkat ketimpangan pendapatan di negara-negara tersebut rendah. Penelitian Iniguez-Montiel & Kurosaki, (2018), menemukan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi akan meningkatkan tingkat kemiskinan begitu juga sebaliknya yang terjadi di negara berkembang (Foltz & Opoku-Agyemang, 2015). Menurut Fosu (2017), bahwa pendapatan yang lebih tinggi di tengah ketimpangan pendapatan yang lebih rendah di negara berkembang dapat menyiratkan kemampuan yang lebih besar untuk menerjemahkan pertumbuhan ekonomi ke dalam pengurangan kemiskinan. Pengurangan kemiskinan sangat ditentukan oleh pertumbuhan pendapatan dan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat diturunkan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan pertumbuhan pendapatan agar berimbang terhadap penurunan kemiskinan (Leow & Tan, 2019). Ketimpangan yang lebih rendah dapat memacu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, menyimpulkan variabel bebas berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Faktor dari belanja pemerintah daerah mampu menurunkan tingkat kemiskinan, begitu juga dengan PDRB perkapita dan penurunan ketimpangan dapat mengurangi kemiskinan. Kemampuan dalam menurunkan kemiskinan terjadi pada belanja pemerintah sektor pendidikan dan belanja perlindungan sosial berdasarkan nilai koefisien terbesar dibandingkan variabel independen lainnya. Peningkatan belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM agar menciptakan manusia yang produktif sehingga dengan cepat akan memperoleh pekerjaan, keahlian dan keterampilan. Belanja pendidikan dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi program-program pendidikan yang secara jangka panjang dapat menurunkan kemiskinan melalui berbagai mekanisme kegiatan-kegiatan di sektor pendidikan.

Kemudian belanja pemerintah perlindungan sosial diutamakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program *pro poor*. Belanja pemerintah perlindungan sosial dijalankan melalui program-program yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan yang diutamakan terhadap penduduk miskin. Sedangkan variabel kesejahteraan yang diproksikan dengan PDRB perkapita untuk menurunkan kemiskinan dengan cara meningkatkan output perkapita. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan *entrepreneurship* serta produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya variabel ketimpangan pendapatan yang diwakili oleh gini rasio mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan perlu membuat kebijakan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Salah satu cara menurunkan ketimpangan pendapatan dapat melalui peningkatan output (pertumbuhan ekonomi) sehingga ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat dikurangi.

REFERENSI

- Abdelhak, S., Sulaiman, J., & Mohd, S. (2012). The role of assets in the enhancement of households' income: A study of poverty alleviation among rural communities of Kelantan and Terengganu. *Asian Social Science*. <https://doi.org/10.5539/ass.v8n11p145>
- Adegboyo, O. S. (2020). Does government spending reduce poverty in Nigeria? Evidence from Auto-Regressive Distributed Lag Specification. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i2.17322>
- Arsani, A. M., Ario, B., & Ramadhan, A. F. (2020). Impact of Education on Poverty and Health : Evidence from Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i1.34921>
- Bandiyo, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm

- Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235>
- Brata, A. G. (2005). Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Chemingui, M. A. (2007). Public Spending and Poverty Reduction in an Oil-Based Economy: The Case of Yemen. *IFPRI Discussion Paper, 00701*(July).
- De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2000). Rural poverty in Latin America determinants and exit paths. *Food Policy*. [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(00\)00023-3](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(00)00023-3)
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government spending, growth and poverty in rural India. *American Journal of Agricultural Economics*. <https://doi.org/10.1111/0002-9092.00101>
- Fiszbein, A., Kanbur, R., & Yemtsov, R. (2014). Social Protection and Poverty Reduction: Global Patterns and Some Targets. *World Development*, 61, 167–177. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2014.04.010>
- Foltz, J. D., & Opoku-Agyemang, K. A. (2015). Do Higher Salaries Lower Petty Corruption? A Policy Experiment On West Africa's Highways. *IGC Interational Growth Centre*.
- Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. *Research in Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.05.005>
- Gujarati, D. N. (2006). *Essentials of Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin.
- Iniguez-Montiel, A. J., & Kurosaki, T. (2018). Growth, inequality and poverty dynamics in Mexico. *Latin American Economic Review*. <https://doi.org/10.1186/s40503-018-0058-9>
- Ishak, J. F. (2017). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.20961/jab.v17i1.212>
- Leow, K. W., & Tan, E. C. (2019). Determinants of poverty: A dynamic panel data analysis with controls for income level and inequality. *Malaysian Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/10.22452/MJES.vol56no2.3>
- Pangestuty, F. W., & Prasetya, F. (2012). Linkages Between Public Sector Expenditure on Economic Growth and Rural Poverty of Indonesia. *J. Basic. Appl. Sci. Res*.
- Ramesh, M., & Wu, X. (2008). Realigning public and private health care in southeast Asia. *Pacific Review*. <https://doi.org/10.1080/09512740801990238>
- Sakinah, N., & Pudjianto, H. (2018). Determinants of Poverty in East Java Metropolitan Area in 2010-2016. *Eko-Regional Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2018.13.2.1171>
- Suri, T., Boozer, M. A., Ranis, G., & Stewart, F. (2011). Paths to Success: The Relationship Between Human Development and Economic Growth. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.08.020>
- Taruno, H. T. (2019). Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018. *The Indonesian Journal of Planning and Development*. <https://doi.org/10.14710/ijpd.4.2.49-56>
- Ulu, M. I. (2018). The Effect of Government Social Spending on Income Inequality In OECD : A Panel Data Analysis. *International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences*.